

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan terkait implementasi strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur maa diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan tahunan dalam implementasi strategi TPBIS oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah disusun selaras dengan kebijakan nasional, khususnya mengacu pada Pasal 3 Peraturan Perpusnas No. 3 Tahun 2023. Proses perumusannya dilakukan secara sistematis dan partisipatif dengan arahan dari Perpusnas yang kemudian disesuaikan oleh tim pelaksana TPBIS di tingkat provinsi berdasarkan kondisi daerah. Tujuan tahunan ditetapkan melalui koordinasi dengan bidang pembinaan perpustakaan yang menjadi pelaksana utama program. Selain itu, program ini telah memperoleh dukungan dari pimpinan daerah dan dimasukkan dalam perencanaan jangka menengah daerah. Tujuan ini mencakup peningkatan jumlah masyarakat sasaran, diversifikasi program pelatihan, penguatan kemitraan lintas sektor, peningkatan kualitas SDM pelaksana, serta pengembangan sarana prasarana

pelayanan berbasis inklusi sosial. Terakhir, dari segi relevansi terhadap masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa tujuan TPBIS tidak terbatas pada literasi baca-tulis, melainkan juga pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan nyata.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dasar yang diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Kebijakan ini tidak hanya merujuk pada regulasi formal di tingkat nasional melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2023, tetapi juga telah diinternalisasi ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai, khususnya di Tim TPBIS. Kebijakan dasar tersebut menjadi acuan kerja yang jelas bagi seluruh pegawai dan telah mendorong peningkatan motivasi kerja melalui arahan pimpinan, kewajiban mengikuti pelatihan dan sertifikasi pelatih ahli, serta dukungan fasilitas kerja yang memadai. Pengalaman peserta program TPBIS terlayani dengan baik dan memperoleh manfaat nyata dari pelatihan yang diberikan. Dengan demikian, kebijakan dasar yang konsisten, terstruktur, dan diterapkan secara menyeluruh mampu meningkatkan semangat kerja pegawai serta mendukung keberhasilan implementasi strategi TPBIS..

3. Pengalokasian sumber daya merupakan elemen vital dalam implementasi strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Pembiayaan program TPBIS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun keterbatasan dana sering kali membatasi pelaksanaan program secara maksimal. Keberhasilan implementasi TPBIS sangat bergantung pada sumber daya manusia yang terlibat. Tim pelaksana yang terdiri dari 18 orang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan kolaborasi dengan narasumber eksternal. Keterlibatan ahli eksternal dan pengembangan jejaring melalui kemitraan lintas sektor memungkinkan penguatan kapasitas tim dan perluasan jangkauan layanan. Fasilitas yang ada, seperti ruang baca, Inkubator Literasi, dan Graha Pustaka, telah cukup memadai dalam mendukung kegiatan TPBIS. Penggunaan fasilitas eksternal dan dukungan mitra CSR turut membantu dalam memperluas cakupan pelatihan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal ketersediaan alat yang ramah disabilitas, yang menjadi tantangan dalam menyediakan layanan yang sepenuhnya inklusif.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya mengacu pada pedoman nasional TPBIS yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hal ini tercermin dari pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada prinsip inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan literasi berbasis potensi lokal. Dinas juga telah menunjukkan kepatuhan terhadap aspek legal dan administratif dalam pengelolaan anggaran, kerja sama lintas sektor, serta penyelenggaraan pelatihan dan layanan kepada kelompok sasaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi TPBIS di Perpustakaan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi standar pelaksanaan yang ditetapkan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penentuan jumlah pelatihan yang pasti di tiap tahunnya. Lebih melibatkan stakeholder eksternal seperti komunitas, akademisi, dan masyarakat sasaran sehingga tujuan yang dirumuskan lebih partisipatif. Program pelatihan dalam TPBIS sebaiknya lebih divariasikan dan diperluas sasarannya.
2. Senantiasa menguatkan kebijakan dasar untuk seluruh pegawai yang terlibat telah tersertifikasi dan mendapat pelatihan berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang ada,

baik dari segi pelaksanaan program maupun dampaknya terhadap motivasi kerja pegawai. Dinas dapat mengembangkan sistem insentif berbasis kinerja sebagai bagian dari kebijakan internal guna memberikan penghargaan kepada pegawai yang aktif dan inovatif dalam pelaksanaan TPBIS.

3. Perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan dengan perluasan kerja sama dengan mitra eksternal melalui CSR harus diformalkan dalam bentuk perjanjian yang lebih terstruktur, untuk memastikan keberlanjutan pendanaan dan pengembangan program. Untuk memperkuat kapasitas SDM, perluasan kemitraan dengan berbagai ahli eksternal, serta peningkatan jumlah pelatihan untuk memperluas keterampilan teknis, akan membantu meningkatkan keberhasilan program. Memperhatikan ketersediaan fasilitas yang lebih ramah disabilitas, terutama dalam alat praktek yang dapat diakses oleh semua peserta, termasuk penyandang disabilitas. Upaya peningkatan fasilitas khusus, serta pengadaan peralatan pendukung lainnya, akan memastikan semua kelompok masyarakat dapat mengakses dan mengikuti program TPBIS secara setara.